

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Manusia merupakan makhluk yang memiliki daya pikir dan akal yang dapat mengarahkan jalan kehidupannya. Keistimewaan tersebut tidak dimiliki oleh makhluk lain, sehingga dapat dikembangkan seiring dengan perjalanan dan pertumbuhan kehidupan manusia. Perkembangan berpikir, daya nalar, berbicara yang dimiliki oleh manusia dapat menentukan jalan untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik dan berkualitas. Tidak hanya itu, dengan mengembangkan keistimewaan yang dimiliki manusia, maka dapat memahami norma atau etika sosial. Pada hakikatnya, manusia memiliki dua persoalan yaitu manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan di bumi, dan manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki sifat dan karakteristik (Thabrani, 2013 : 11). Maka dari itu, untuk mengembangkan keistimewaan, sifat, dan karakteristik yang dimiliki oleh manusia, diperlukan pendidikan.

Menurut Human Development Report tahun 1990 dalam Badan Pusat Statistik (2015 : 7) bahwa “Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya”. Artinya bahwa manusia merupakan makhluk yang memiliki potensi untuk dikembangkan dan dapat menyejahterakan bangsa dan negara. Terdapat tiga pilihan mendasar bagi kehidupan manusia yaitu umur panjang, memperoleh akses pendidikan, dan terpenuhinya sumber kehidupan yang layak. Pendidikan merupakan salah satu aspek penting untuk mendukung kehidupan manusia. Melalui pendidikan, dapat merubah kehidupan manusia dan negara. Pendidikan diperlukan

untuk mengembangkan potensi setiap individu. Setiap individu berkewajiban untuk mengenyam pendidikan sejak masih anak hingga dewasa. Negara pun memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan bagi masyarakatnya. Hal ini sudah tercantum legalitasnya dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 2 yang berbunyi “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”.

Dalam pembangunan manusia, diperlukan pengukuran terhadap variabel pendidikan. Sebagaimana menurut UNDP dalam Badan Pusat Statistik (2015 : hal.10), bahwa “untuk mengukur Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berdasarkan tiga pendekatan dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Pendidikan menjadi dimensi yang digunakan untuk mengukur angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), karena pendidikan merupakan pilar penting dalam menentukan kualitas manusia. Manusia dengan kualitas pendidikan yang baik, akan lebih memperhatikan dan mengutamakan kesehatan, serta memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh pekerjaan dan meningkatkan pendapatannya.

Untuk mengukur dimensi pendidikan atau pengetahuan dalam Indeks Pembangunan Manusia, menggunakan indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata – rata Lama Sekolah. Harapan Lama Sekolah merupakan periode waktu sekolah (dalam tahun) yang diharapkan dapat ditempuh oleh anak pada usia tertentu di masa yang akan datang. Jadi indikator HLS untuk menunjukkan kondisi pendidikan di berbagai jenjang melalui lamanya pendidikan yang diharapkan dapat tercapai oleh setiap anak. Sedangkan Rata – rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan

sebagai rata – rata jumlah pendidikan yang telah ditempuh oleh penduduk pada seluruh jenjang pendidikan formal yang dihitung pada usia 25 tahun ke atas. RLS untuk menunjukkan kualitas pendidikan suatu penduduk, karena semakin lama atau tinggi tingkat pendidikan yang telah dicapai, maka semakin berkualitas pola pikir penduduknya serta berdampak pada peningkatan IPM. Sama halnya dengan HLS, RLS memiliki batasan minimum 0 tahun dan maksimumnya 15 tahun (Badan Pusat Statistik, 2015 : hal. 103).

Kabupaten Brebes merupakan salah satu daerah dengan jumlah penduduk terbanyak se – provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, bahwasannya jumlah penduduk Kabupaten Brebes mencapai 2.010.617 jiwa dari 37.032.410 penduduk Provinsi Jawa Tengah. Jika dilihat dari pembangunan manusianya, IPM Kabupaten Brebes masih berada diposisi paling rendah se – Provinsi Jawa Tengah yaitu 72,79%. Berdasarkan data dari Berita Resmi Statistik No. 02/01/3329/Th.XXIII, yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes pada 20 Januari 2023, bahwa Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Brebes pada tahun 2022 mencapai 67,03%.

Tabel 1. 1 Angka IPM Kabupaten Brebes 2018 - 2022

<b>Tahun</b>	<b>Angka IPM</b>
2018	65,68
2019	66,12
2020	66,11
2021	66,32
2022	67,03

Sumber : BPS Kabupaten Brebes tahun 2023

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwasannya IPM Kabupaten Brebes sejak tahun 2018 sampai 2022 mengalami peningkatan yang masih dikatakan rendah,

karena belum mencapai hingga peningkatan satu persen. Artinya bahwa peningkatan tersebut tidak signifikan.

Menurut Edy Kusmartono selaku Kepala Baperlitbangda Kabupaten Brebes, bahwa terdapat salah satu indikator yang tidak mencapai target dan berdampak pada angka IPM yang masih rendah di Jawa Tengah, yaitu indikator pendidikan. Tidak tercapainya ketersediaan sekolah menjadi penyebabnya. Oleh karena itu, sektor pendidikan perlu memperoleh perhatian khusus karena sangat berpengaruh pada nilai IPM (Suripto, 2021). Berikut tabel yang menunjukkan tidak tercapainya indikator pendidikan.

Tabel 1. 2 Indikator Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Brebes tahun 2018 sampai 2022

No	Indikator	Target (tahun)					Capaian (tahun)				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	Usia Harapan Hidup saat lahir	68,43	68,4	68,5	68,5	68,5	68,84	69	69,3	69,5	69,7
2	Harapan Lama Sekolah	11,71	11,9	12,1	12,3	12,4	12,02	12	12	12,1	12,2
3	Rata - rata Lama Sekolah	6,55	6,74	6,94	7,15	7,37	6,19	6,2	6,21	6,22	6,35

Sumber : Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Brebes 2017 – 2022, Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes 2017 – 2022, dan Berita Resmi Statistik No. 02/01/3329/Th.XXIII

Berdasarkan tabel tersebut, indikator Usia Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merupakan dimensi kesehatan dari tahun 2018 sampai 2022 mengalami peningkatan dan mencapai target yang telah direncanakan. Sedangkan pada indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata – rata Lama Sekolah (RLS) mengalami peningkatan dari tahun 2018 sampai 2022 namun tidak mencapai target yang telah direncanakan. Dengan demikian, perlu adanya peran pemerintah untuk memperbaiki pendidikan masyarakat di Kabupaten Brebes.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki tingkat pendidikan masyarakat, baik melalui bantuan operasional pendidikan, pengadaan Kartu Indonesia Pintar (KIP), maupun penyediaan sekolah non formal (Paket A, Paket B, Paket C), dan bantuan lainnya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang – Undang Dasar 1945 pasal 31, bahwasannya pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan pendidikan nasional, serta menganggarkan dua puluh persen dari APBN maupun APBD. Menjadi suatu kewajiban dan tanggung jawab bagi pemerintah untuk menangani urusan pendidikan masyarakat. Meskipun demikian, yang menjadi penyebab indikator pendidikan masih dibawah target dan angka IPM tidak meningkat signifikan di Kabupaten Brebes, karena masih banyak masyarakat yang tidak sekolah/putus sekolah. Hal tersebut dapat diartikan bahwasannya tingkat partisipasi sekolah masyarakat masih rendah.

Partisipasi sekolah merupakan hal penting yang perlu dilakukan pendataan sebagai bahan acuan bagi pemerintah mengevaluasi program pendidikan yang telah diselenggarakan, apakah meningkat atau tidak. Angka Partisipasi Kasar (APK) menjadi alat pengukuran untuk mengetahui secara lebih spesifik banyaknya masyarakat yang mengenyam pendidikan di setiap jenjang, sekaligus untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat.

Tabel 1. 3 Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Brebes dari tahun 2018 - 2022

<b>Jenjang Pendidikan</b>	<b>Angka Partisipasi Kasar (Persen)</b>				
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
SD/MI	110,13	111,82	109,96	108,56	108,84
SMP/MTs	88,89	85,37	88,21	89,71	93,65
SMA/SMK/MA	69,29	68,96	70,34	73,73	73,36

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes, 2023

Dapat diketahui bahwa tingkat partisipasi penduduk untuk mengenyam pendidikan mengalami fluktuasi, masih banyak terjadi anak tidak sekolah atau anak putus sekolah. Disisilain, APK tingkat SD/MI lebih banyak daripada tingkat SMP/MTs dan tingkat SMA/SMK. Artinya bahwa tingkat partisipasi masyarakat untuk mengenyam pendidikan hingga tingkat SMA masih rendah, bahkan tidak mencapai angka 80% hingga ke tingkat SMA. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, baik dari orang tua sendiri yang tidak mendukung anak untuk bersekolah, lingkungan anak yang kurang baik, maupun perekonomian keluarga, di mana anak ingin bersekolah namun orang tua tidak memiliki biaya. Oleh karena itu, diperlukan kehadiran dari berbagai *stakeholder*, baik dari pemerintah, lembaga masyarakat, maupun pebisnis untuk memperbaiki pendidikan masyarakat.

Sebagai upaya untuk mengatasi Anak Tidak Sekolah (ATS) sekaligus peningkatan IPM di Kabupaten Brebes, Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pembangunan Daerah Kabupaten Brebes mencanangkan Program Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) sejak tahun 2017, yang kemudian diresmikan oleh pemerintah pada 10 Juli 2017 (Priyanti, 2018 : 5). Peresmian tersebut tidak hanya meresmikan program GKB, namun sekaligus peresmian Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) yang akan berperan penting dalam pelaksanaan program. Program GKB telah dipayungi hukum dalam Peraturan Bupati Nomor 115 tahun 2017 tentang Rintisan Penuntasan Pendidikan Dua Belas Tahun, yang kemudian dilakukan perubahan yaitu Peraturan Bupati Nomor 49 tahun 2022.

Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) merupakan program pengembalian anak tidak sekolah maupun anak putus sekolah untuk kembali bersekolah, sekaligus

upaya untuk memperbaiki akses pelayanan dasar di bidang pendidikan. Tujuannya adalah untuk mendongkrak angka IPM pada bidang pendidikan sekaligus menurunkan angka kemiskinan (Priyanti, 2018 : 5). Program ini dinaungi oleh dua kelembagaan yaitu dari tim GKB dan Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) yang masing – masing memiliki tugas dan fungsi. (Marista, 2021 : 10).

Tabel 1. 4 Fungsi Tim GKB dan Tim FMPP Kabupaten Brebes

	<b>Anggota</b>	<b>Fungsi</b>
<b>Tim GKB</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bupati</li> <li>2. Sekretaris Daerah</li> <li>3. Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pembangunan Daerah</li> <li>4. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga</li> <li>5. Kementerian Agama</li> <li>6. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan anggaran</li> <li>2. Penyedia Data ATS yang terhimpun dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik) oleh Kemendikbud dan EMIS (<i>Education Management Information System</i>) oleh Kemenag</li> <li>3. Perencana kegiatan</li> <li>4. Perumusan kebijakan</li> <li>5. Penyelenggaraan sosialisasi</li> <li>6. Monitoring dan evaluasi</li> </ol>
<b>Tim FMPP</b>	Relawan Masyarakat Peduli Pendidikan dari tingkat kabupaten hingga tingkat desa.	Berperan dalam pengembalian Anak Tidak Sekolah (ATS) secara langsung, yang dimulai sejak rekonfirmasi data hingga pendampingan ATS.

Sumber : Skripsi Brigetsa Dwi Marista, 2021.

Berdasarkan Peraturan Bupati Brebes Nomor 49 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 115 tahun 2017 tentang Rintisan Penuntasan Pendidikan Dua Belas Tahun Kabupaten Brebes, bahwa sasaran Program GKB yaitu anak tidak/belum pernah sekolah, anak tidak melanjutkan sekolah, anak putus sekolah, dan anak usia sekolah yang berkebutuhan khusus pada setiap jenjang dari SD/MI hingga SMA/SMK/MA. Bantuan biaya pendidikan yang berbeda dan diberikan setiap tahun dalam dua tahap. Pada jenjang SD/MI dan Paket

A sebesar Rp 800.000/siswa; Jenjang SMP/MTs sebesar Rp 1.000.000/siswa; Jenjang Paket B sebesar Rp 1.200.000/siswa; Jenjang SMA/SMK/MA dan Paket C sebesar Rp 1.400.000/siswa.

Pada awal dirintisnya Program Gerakan Kembali Bersekolah tahun 2017, menargetkan 1000 anak kembali bersekolah dan telah berhasil mengembalikan sebanyak 1.212 anak. Pada tahun 2018 target pengembalian ATS sebanyak 13.000 dengan anggaran yang berasal dari APBD 2018 sebanyak 5,7 Milyar. (Priyanti, 2018 : 10). Berikut ini target dan capaian pengembalian ATS ke sekolah pada tahun 2018 sampai tahun 2021 menurut Baperlitbangda Kabupaten Brebes.

Tabel 1. 5 Target dan Capaian pengembalian ATS ke sekolah pada tahun 2018 sampai 2021

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Capaian</b>
2018	5.000	4.047
2019	5.000	5.118
2020	6.000	6.541
2021	1.100	1.308
<b>Total</b>		<b>17.041</b>

Sumber : Baperlitbangda Kabupaten Brebes, 2022.

Program GKB juga telah berdampak besar pada peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) dari tahun 2016 sekitar 63% hingga tahun 2021 sekitar 78%, Angka Partisipasi Kasar (APK) dari tahun 2016 sekitar 82% hingga tahun 2021 sekitar 90%, sedangkan Harapan Lama Sekolah (HLS) dari tahun 2016 hanya 11,37 tahun hingga tahun 2021 mencapai 12,05, dan Rata – rata Lama Sekolah (RLS) dari tahun 2016 hanya 6,17 hingga tahun 2021 mencapai 6,22 tahun (Baperlitbangda Kabupaten Brebes, 2022). Maka dari itu, pada tahun 2019 program ini memperoleh predikat 45 top inovasi pelayanan publik di Indonesia dari KemenPAN-RB (Seksi

Humas dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Brebes, 2022).

Penelitian ini berdasarkan pada beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya tentang Program Gerakan Kembali Bersekolah di Kabupaten Brebes. Penelitian tentang implementasi Gerakan Kembali Bersekolah di salah satu kecamatan di Kabupaten Brebes oleh (Marista, 2021) dengan menggunakan teori *What's Happening* dari Ripley dan Franklin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program GKB menghadapi sejumlah hambatan yang menghambat pencapaian tingkat optimal. Program ini melibatkan dua kelompok lembaga, yaitu Tim GKB di tingkat kabupaten dan Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) di tingkat kabupaten hingga desa. Hambatan utama dalam pelaksanaan program adalah kurangnya pemahaman yang jelas mengenai tujuan Program GKB. Hal ini mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman antara anggota Tim GKB dan FMPP. Faktor mutasi jabatan juga turut berkontribusi pada kurangnya pemahaman ini, karena pemimpin yang baru harus memahami program tersebut terlebih dahulu. Akibatnya, upaya sosialisasi program kepada masyarakat masih belum optimal, dan banyak orang tua yang belum mengetahui tujuan sebenarnya dari Program GKB. Kurangnya koordinasi dan komunikasi antar-aktor, terutama di tingkat kecamatan, menjadi masalah serius. Beberapa pengurus FMPP bersifat pasif, sehingga aktor yang aktif harus mengambil alih tugas yang seharusnya mereka lakukan. Hal ini mengakibatkan dari tiga tahapan program yang direncanakan, hanya dua tahap awal yang dapat dilaksanakan dengan baik. Selain itu, kurangnya koordinasi antara FMPP dan pemangku kepentingan lainnya juga menghambat pengumpulan dana

dari masyarakat atau mitra-mitra potensial. Keterbatasan anggaran yang diberikan oleh pemerintah juga memengaruhi kinerja FMPP dalam memantau atau mendampingi siswa GKB di sekolah. Situasi ini juga mempengaruhi beberapa siswa GKB untuk memutuskan berhenti sekolah karena biaya pendidikan yang tidak mencukupi. Semua hambatan ini menjadi tantangan serius dalam upaya pelaksanaan Program GKB yang efektif.

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Khaerunissa & Nurwulan, 2023) tentang dampak dari sosialisasi Program Gerakan Kembali Bersekolah terhadap partisipasi bersekolah pada Anak Tidak Sekolah (ATS). Dalam penelitiannya dijelaskan terdapat tiga alur dalam pelaksanaan Program GKB, yaitu pendataan, pengembalian, serta pendampingan dan pemantauan. Hasil penelitian menjelaskan terdapat tiga tahap utama dalam Program GKB: pendataan, pengembalian, dan pendampingan siswa yang tidak melanjutkan sekolah. Pada tahap pendataan, data siswa ATS dikumpulkan dari berbagai sumber (SIPBM, EMIS, Dapodik, BPS, maupun pendataan langsung), yang kemudian diverifikasi oleh tim FMPP. Tahap pengembalian melibatkan upaya untuk memastikan data siswa ATS yang kembali ke sekolah terverifikasi di Dapodik. Terakhir, tahap pendampingan dan pemantauan bertujuan untuk memantau siswa GKB tetap bersekolah hingga menyelesaikan pendidikan. Meskipun program ini telah meningkatkan beberapa indikator seperti HLS, RLS, APM, dan APK dari tahun 2018 hingga 2021, namun peningkatan tersebut belum mencapai tingkat yang diharapkan dan masih di bawah standar. Kendala yang terjadi meliputi masalah data yang kurang sesuai dengan di lapangan, rotasi pemimpin, dan keterbatasan anggaran. Diperlukan perbaikan dan

peningkatan dalam program ini untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih efektif dan optimal.

Begitupun penelitian tentang pemenuhan hak anak melalui program Gerakan Kembali Bersekolah yang dilakukan oleh (Hakim & Izzatusholekha, 2023). Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa anggaran tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebanyak Rp 5,7 Milyar dan pengembalian anak terbanyak terjadi pada tahun 2022 sebanyak 1857 anak. Program GKB ini merupakan program yang dirancang untuk pengembalian anak ke sekolah sebagai upaya pemerintah untuk memenuhi hak anak di Kabupaten Brebes. Oleh karena itu, program ini telah diadopsi oleh daerah lain dan meraih top 45 inovasi pelayanan publik. Meskipun demikian, Program GKB tidak memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan angka IPM, yang mana dibuktikan dengan lambatnya peningkatan angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata – rata Lama Sekolah (RLS). Hal terpenting adalah peran pemerintah untuk tetap berkomitmen menjalankan program ini meskipun telah mengalami pergantian pemimpin, sebagai pemenuhan hak anak atas pendidikan wajib dua belas tahun.

Berdasarkan hasil penemuan dalam tiga penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa adanya Program GKB telah meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), Harapan Lama Sekolah (HLS), dan Rata – rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Brebes. Namun hal tersebut belum dapat mendongkrak angka IPM di Kabupaten Brebes. Dengan demikian, ditemukan berbagai kendala dalam penelitian tersebut yaitu kurangnya komunikasi dan koordinasi, data yang masih tidak sesuai dengan situasi di lapangan, pemahaman

masyarakat yang masih kurang, pendampingan Siswa GKB yang belum maksimal, dan biaya yang dikatakan masih terbatas.

Pemerintah melalui Dindikpora dan Baperlitbangda telah melakukan monitoring dan evaluasi Program GKB setiap tahun bersama FMPP, tetapi dalam penelitian yang dirilis tahun 2021 hingga tahun 2023 menunjukkan permasalahan yang belum teratasi. Maka dari itu, dalam penelitian ini akan membahas tentang hasil evaluasi Program GKB yang telah dilaksanakan oleh pemerintah dan strategi pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang terjadi berdasarkan penemuan dalam penelitian sebelumnya.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang tercantum pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana evaluasi Program Gerakan Kembali Bersekolah di Kabupaten Brebes?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, dan keberhasilan dari Program Gerakan Kembali Bersekolah untuk memperbaiki pelayanan dasar di bidang pendidikan.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang akan dicapai, maka penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis :
  - a. Memberikan sumbangan wawasan dan pengetahuan terkait hasil dari pelaksanaan program.

- b. Sebagai bahan referensi bagi peneliti lainnya pada masa yang akan datang.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi penulis

Memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan baru terkait program “Gerakan Kembali Bersekolah” di Kabupaten Brebes, serta pengetahuan dan wawasan terkait hasil dari pelaksanaan program.

### b. Bagi masyarakat

Memberikan pengetahuan terkait evaluasi program sekaligus memperkenalkan adanya program “Gerakan Kembali Bersekolah” di Kabupaten Brebes.

### c. Bagi pemerintah

Sebagai bahan pengingat bagi pemerintah terkait rencana perbaikan Program “Gerakan Kembali Bersekolah” yang telah disampaikan dalam penelitian ini. Sehingga dalam pelaksanaan program ke depannya dapat berjalan lebih optimal dan tujuan tercapai dengan maksimal.

## 1.5. Literature Review

### 1.5.1. Landasan Teori

#### 1.5.1.1. Teori Evaluasi Program

Evaluasi dan program merupakan dua kata yang memiliki makna berbeda. Evaluasi merupakan salah satu rangkaian dari suatu proses. Definisi evaluasi menurut (Arifin, 2019 : 14) bahwa, evaluasi merupakan proses yang dilakukan sistematis, terencana, dan berkelanjutan untuk

menentukan nilai/manfaat, pertimbangan, dan keputusan. Ruang lingkup evaluasi mencakup seluruh sistem yang terdapat di dalam suatu komponen, dan tidak hanya melibatkan pihak internal namun juga melibatkan pihak eksternal. Program merupakan suatu rencana kegiatan yang lebih logis, sistematis, dan terencana, yang didasarkan pada kebijakan tertentu. Program lebih bersifat dinamis. Artinya, pelaksanaan program akan selalu berubah dan berkembang mengikuti perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi terhadap suatu kelayakan program. Pengevaluasian terhadap program ini dapat menjadi dasar apa yang harus diperbaiki, dan apakah program layak untuk dilanjutkan atau diberhentikan.

Berdasarkan hal tersebut, definisi evaluasi program menurut (Arifin, 2019 : 8) bahwa “evaluasi program adalah suatu proses atau kegiatan ilmiah yang dilakukan secara berkelanjutan dan menyeluruh sebagai upaya pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu (nilai dan arti) suatu program, berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu untuk membuat suatu keputusan dan pertanggungjawaban dalam melaksanakan program.” Definisi lain dari evaluasi menurut (Stufflebeam, 1973 dalam (Arifin, 2019 : 124)) bahwa “evaluasi diartikan sebagai suatu proses mendeskripsikan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang berguna untuk menilai alternatif keputusan.”

Menurut Stufflebeam, model yang digunakan untuk mengevaluasi program yaitu Model Evaluasi CIPP (*Context, Input,*

*Process, and Product*). Tujuannya adalah untuk menilai dan mengembangkan manfaat program, menyediakan informasi guna memperoleh keputusan alternatif, serta mengembangkan kebijakan program. Model Evaluasi CIPP meliputi:

1. *Context evaluation to serve planning decision*

Evaluasi terhadap konteks berkaitan dengan penyediaan informasi supaya dapat mencapai tujuan. Informasi yang diperoleh dengan mengidentifikasi terkait dengan kebutuhan program, kendala, kondisi, maupun isu yang terjadi dalam lingkungan program. Evaluasi ini bertujuan untuk memberikan keputusan supaya dapat memperbaiki program dan membantu merumuskan “*goal and objectives*”. Evaluasi konteks dapat membantu dalam perencanaan keputusan, penentuan kebutuhan yang akan dicapai oleh program, serta perumusan tujuan program (Farida Yusuf Tayibnapi dalam Setiyaningrum, 2016 : 25). Tujuan utama evaluasi konteks yaitu untuk mengevaluasi seluruh situasi yang terdapat dalam sebuah organisasi, mengetahui dan memahami semua kelemahan yang ada, mengidentifikasi kekuatan yang dapat digunakan untuk mengatasi kelemahan tersebut, mendiagnosis masalah yang sedang dihadapi organisasi, serta mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Data hasil evaluasi konteks berperan dalam beberapa jenis keputusan, yaitu untuk menentukan *setting* yang akan digunakan, mengidentifikasi tujuan umum yang akan diusahakan, dan merumuskan

target yang akan dicapai. Analisis situasi berfungsi sebagai landasan bagi rancangan proyek yang lebih terperinci dan khusus.

## 2. *Input evaluation, structurin decision*

Evaluasi terhadap *input* merupakan kegiatan evaluasi yang berkaitan dengan identifikasi aset, permasalahan, maupun peluang yang dapat membantu para pengambil keputusan untuk mendefinisikan tujuan, prioritas, rencana, maupun sumber alternatif dalam rangka memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan yang telah ditargetkan. Evaluasi *input* menjadi sebuah evaluasi yang dapat menyediakan informasi terkait masukan yang telah terpilih, poin kelebihan dan kelemahan, strategi, maupun desain untuk merealisasikan tujuan (Sukardi dalam Setyaningrum, 2016 : 26). Tujuannya adalah untuk membantu para pengambil keputusan agar terhindar dari inovasi yang sia – sia atau ada kemungkinan terjadi kegagalan. Evaluasi ini mencakup usaha untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai aspek, yaitu kemampuan agen dan kelompok yang memiliki tanggung jawab yang relevan, beragam strategi yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan proyek, serta perancangan yang diperlukan untuk menerapkan strategi secara khusus. Informasi yang dikumpulkan dalam evaluasi input memiliki peran penting dalam merancang desain yang sesuai untuk mencapai tujuan proyek.

## 3. *Process evaluation, to serve implementing decision*

Evaluasi proses merupakan evaluasi yang berupaya dalam pemantauan kembali pelaksanaan program, peninjauan kembali rencana organisasi serta evaluasi yang telah dilakukan. Evaluasi proses berfungsi untuk mengidentifikasi atau mengantisipasi rancangan prosedur atau implementasi yang akan terjadi selama tahap pelaksanaan. Selain itu, evaluasi ini juga memberikan data yang digunakan dalam pengambilan keputusan terkait program, dan berfungsi sebagai catatan atau dokumen tentang prosedur yang telah dilaksanakan (Setyaningrum, 2016 : 27). Tujuan utama evaluasi proses menurut (Mutrofin dalam Setyaningrum, 2016 : 29) yaitu :

- 1) Untuk menghindari konsekuensi program yang tidak diinginkan, penting bagi para manajer program untuk dapat secara tepat waktu mengidentifikasi berbagai dampak yang tidak terduga.
- 2) Untuk memberikan informasi yang berkelanjutan mengenai kinerja program, seperti tingkat pelaksanaan, kesesuaian dengan tujuan awal, dan isu-isu terkait bagaimana program akan diterima atau diadopsi.
- 3) Untuk mendokumentasikan segala hal yang terjadi dalam proyeknya.

Fungsi utama dari evaluasi proses yaitu untuk memberikan arahan dan masukan kepada staf organisasi supaya dapat melaksanakan programnya sesuai dengan rencana atau dapat melakukan modifikasi

rencana yang ternyata hasilnya buruk. Sehingga evaluasi proses dapat menjadi data dan sumber informasi untuk menafsirkan hasil dari produk.

#### 4. *Product evaluation, to serve recycling decision*

Evaluasi produk merupakan evaluasi akhir dari suatu program yang berkaitan dengan identifikasi terhadap keluaran maupun manfaat dari program atau proyek, baik hasil yang direncanakan maupun tidak direncanakan, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Evaluasi produk bertujuan untuk mendukung proses pengambilan keputusan selanjutnya, baik terkait dengan hasil yang telah dicapai maupun tindakan yang akan diambil setelah program berjalan. Evaluasi produk berfokus pada perubahan yang terjadi pada input awal. Ini merupakan tahap terakhir dari serangkaian evaluasi program (Farida Yusuf Tayibnapi dalam Setyaningrum, 2016 : 30). Evaluasi produk mengintegrasikan informasi untuk memberikan keyakinan tentang kapan dan bagaimana tujuan tercapai, serta untuk menentukan apakah strategi yang terkait dengan prosedur dan metode yang digunakan untuk mencapai tujuan sebaiknya dihentikan, dimodifikasi, atau diteruskan dalam bentuk yang sama seperti sekarang (Sukardi dalam Setyaningrum, 2016 : 30). Tujuan evaluasi produk untuk mengevaluasi sejauh mana program memenuhi kebutuhan sasaran program. Penilaian mengenai keberhasilan program atau organisasi ini dikumpulkan dari individu atau kelompok yang terlibat, dan kemudian dianalisis. Dengan

kata lain, evaluasi tersebut menganalisis keberhasilan atau kegagalan program dari berbagai perspektif.

### **1.6. Operasionalisasi Konsep**

Evaluasi program menjadi salah satu kegiatan dalam pelaksanaan program, dengan berbagai tujuannya seperti untuk mengetahui keefektifan suatu program, hambatan pelaksanaan program, relevansi antara program dengan rencana, dan sebagainya. Dalam penelitian tentang evaluasi Program Gerakan Kembali Bersekolah sebagai upaya untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ini melihatnya dari sudut pandang terkait langkah yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki program, rencana atau strategi pemerintah supaya program dapat terlaksana dengan baik dapat mencapai tujuannya dan permasalahan program tidak kembali terjadi, pelaksanaan hasil evaluasi pemerintah telah sesuai dengan rencana atau belum, serta keberlanjutan program.

Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan teori dari Stufflebeam tentang Model Evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, and Product*).

#### *1. Context evaluation to serve planning decision*

Evaluasi yang dilakukan dengan mengidentifikasi terkait kebutuhan, kendala, maupun isu yang terjadi di lingkungan program. Tujuannya adalah untuk memperbaiki program melalui pemenuhan kebutuhan, solusi atas kendala maupun isu yang terjadi, supaya tujuan program dapat tercapai. Pertanyaan yang digunakan untuk menemukan hasil dari aspek evaluasi ini yaitu “*What should we do?*” “Apa yang harus dilakukan?”. Melalui

pertanyaan tersebut, dapat digunakan sebagai pengumpulan data untuk dapat menentukan prioritas, tujuan, dan sasaran.

Pada penelitian ini, didasarkan pada permasalahan yang telah terjadi dan ditemukan dalam penelitian sebelumnya, bahwa permasalahan yang terjadi selalu sama dan belum ada perbaikan yang signifikan dari pemerintah. Oleh karena itu, peneliti akan mengajukan pertanyaan tentang apa yang telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dalam Program Gerakan Kembali Bersekolah supaya dapat memberikan dampak signifikan dalam pembangunan terutama peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Brebes.

## 2. *Input evaluation, structurin decision*

Evaluasi yang dilakukan dengan melakukan identifikasi masalah dan peluang yang dapat dijadikan sebagai sumber alternatif untuk memenuhi kebutuhan organisasi, sehingga program yang dilaksanakan dapat mencapai tujuan. Evaluasi ini dapat membantu para pengambil keputusan supaya menghindari terjadinya hal yang sia – sia dalam mewujudkan inovasi. Tujuannya adalah untuk menentukan sumber alternatif, prosedur kerja, rencana, maupun strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan, serta membantu dalam mengatur keputusan. Aspek ini dapat menggunakan pertanyaan “*How should we do it?*” “Bagaimana kita melaksanakannya?”. Dengan pertanyaan tersebut, dapat diperoleh hasil terkait sumber daya dan langkah untuk dapat mencapai sasaran maupun tujuan yang telah ditentukan.

Untuk menghindari kesalahan pemerintah dalam menyusun rencana dan strategi, maka peneliti mengajukan pertanyaan tentang bagaimana rencana maupun strategi yang akan dilakukan oleh pemerintah ke depannya supaya permasalahan yang terjadi pada Program GKB tidak terulang kembali pada Program GKB *New Model*, sehingga dapat berdampak pada peningkatan IPM di Kabupaten Brebes.

### 3. *Process evaluation, to serve implementing decision*

Evaluasi proses merupakan evaluasi yang berkaitan dengan pemantauan dalam pelaksanaan program, apakah sesuai dengan rencana atau tidak. Evaluasi ini memastikan bahwa proses yang terjadi sesuai dengan rencana yang telah direncanakan dan tidak ada terjadinya penyelewengan. Tujuannya adalah memberikan arahan dan masukan kepada pelaksana program supaya dapat menjalankan program sesuai dengan rencana atau melakukan modifikasi jika program yang dijalankan ternyata hasilnya buruk. Pertanyaan yang digunakan dalam aspek ini yaitu “*Are we doing it as planned?*” “Apakah dikerjakan sesuai dengan rencana?”. Melalui pertanyaan tersebut, diperoleh jawaban atas ketercapaian program berdasarkan tujuan, kelemahan dan kelebihan dalam pelaksanaan program, permasalahan yang timbul, serta perbaikan yang harus dilakukan.

Pada penelitian ini, pemerintah telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Program GKB setiap tahunnya, yang diharapkan ada peningkatan perbaikan program. Namun kenyataannya, permasalahan yang terjadi dari tahun ke tahun selalu terjadi kembali. Oleh karena itu, peneliti

mengangkat pertanyaan tentang apakah hasil evaluasi yang telah dilakukan pemerintah untuk memperbaiki Program GKB sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana atau belum.

#### 4. *Product evaluation, to serve recycling decision*

Evaluasi produk merupakan kegiatan akhir dari evaluasi yang dilakukan dengan identifikasi terkait dengan *output* atau manfaat program, baik yang telah direncanakan atau belum, maupun jangka panjang atau pendek. Tujuannya adalah untuk menilai keberhasilan program, apakah program akan tetap dilanjutkan, dimodifikasi, atau dihentikan. Pertanyaan yang digunakan yaitu “*Did it work?*” “Apakah pekerjaannya berhasil?”. Hasil dari kegiatan ini yaitu *outcome* terkait keputusan program selanjutnya apakah dihentikan, dilanjutkan, maupun dimodifikasi.

Evaluasi pemerintah yang dilakukan setiap tahun sudah pasti terdapat rencana perbaikan Program GKB ke depannya atau untuk tahun berikutnya. Dalam penelitian ini, peneliti mengangkat pertanyaan tentang apakah hasil evaluasi Program GKB yang menjadi rencana perbaikan program sudah dilaksanakan dengan baik, dan berhasil atau tidak.

Tabel 1. 6 Operasionalisasi Konsep

<b>Aspek</b>	<b>Identifikasi</b>	<b>Indikator</b>
<i>Context Evaluation</i>	Kebutuhan dan kendala	1. Kebutuhan yang telah dipenuhi pemerintah untuk memperbaiki permasalahan yang terjadi pada Program

		<p>Gerakan Kembali Bersekolah.</p> <p>2. Kendala pemerintah dalam upaya memperbaiki program berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan setiap tahun.</p>
<i>Input Evaluation</i>	Rencana atau strategi	Rencana atau strategi yang akan dilakukan pemerintah pada Program Gerakan Kembali Bersekolah supaya tidak terulang kembali dan dapat mencapai tujuannya.
<i>Process Evaluation</i>	Pemantauan pelaksanaan	Kesesuaian antara rencana perbaikan Program Gerakan Kembali Bersekolah berdasarkan hasil evaluasi dengan pelaksanaannya.
<i>Product Evaluation</i>	Keberhasilan	Keberhasilan dalam upaya perbaikan Program Gerakan Kembali Bersekolah berdasarkan rencana dari hasil evaluasi program.

## **1.7. Metode Penelitian**

### **1.7.1. Desain Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan dalam penelitian, yang mana peneliti dapat mengumpulkan data melalui interaksi secara langsung dan tatap muka di tempat atau lokasi penelitian menurut (Mc Millan & Schumacher dalam (Soerjasih, Soerjasih, Anggaunitakiranantika, & Haryono, 2017)). Pada penelitian dengan menggunakan metode kualitatif data yang dihasilkan bersifat deskriptif dan bersumber dari lisan orang yang diwawancarai maupun perilaku yang diamati secara langsung (Nugrahani, 2014). Dengan demikian, penelitian ini lebih menekankan dan memanfaatkan wawancara terbuka dengan subjek penelitian yang diikuti dengan pengamatan mendalam terhadap sikap, perasaan, pandangan, maupun perilaku dalam subjek penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk memahami makna dari suatu fenomena secara alamiah atau kenyataan di lapangan. Penelitian kualitatif memiliki karakteristik yang lebih menekankan pada sumber data dan proses, peneliti sebagai instrumen, bersifat deskriptif, analisis data secara induktif, kontak langsung dengan subjek penelitian, dan melakukan penerjunan langsung ke lokasi penelitian.

### **1.7.2. Lokasi Penelitian**

Penelitian tentang Evaluasi Program Gerakan Kembali Bersekolah sebagai Upaya Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia akan dilaksanakan penelitian di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

### **1.7.3. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian yang dapat dijadikan sebagai informan pada penelitian ini yaitu tim GKB yang terdiri dari Subkordinator Kurikulum dan Kesiswaan Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Brebes, Staf Bidang Pemerintah Sosial dan Budaya Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Brebes, serta Ketua FMPP Kabupaten Brebes.

### **1.7.4. Teknik Pengambilan Informan**

Teknik pengambilan informan dalam penelitian ini menggunakan dua teknik :

#### *1. Purposive Sampling*

Pada teknik *purposive sampling* dalam pengambilan informan, peneliti mengutamakan tujuan penelitian untuk menentukan informan yang diharapkan dapat menanggapi kasus atau permasalahan dalam penelitian (Lenaini, 2021). Dalam penelitian ini, tujuannya yaitu untuk mengetahui evaluasi pemerintah terhadap Program Gerakan Kembali Bersekolah dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Dengan demikian, peneliti akan mengambil informan dari Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Brebes khususnya Bidang Pendidikan dan Dasar yaitu Bapak Nur Faozan, S.S. selaku Subkordinator Kurikulum dan Kesiswaan; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yaitu Bapak Bayu Setiawan, S.Kom. selaku Staf Bidang Pemerintah Sosial dan Budaya; Forum

Masyarakat Peduli Lingkungan (FMPP) Kabupaten yaitu Bapak Bahrul Ulum, S.E., M.Si.

## 2. *Snowball sampling*

*Snowball sampling* yaitu teknik pengambilan informan dengan cara berantai, yang mana terjadi pengguliran dari satu informan ke informan yang lain dan terjadi pembengkakan jumlah informan. Hal ini dianalogikan bagaikan bola salju yang semula kecil kemudian semakin membesar. Begitupun dengan informan, yang diawali dengan satu informan, kemudian meluas menjadi banyak informan atau narasumber (Lenaini, 2021). Pada penelitian ini, peneliti mengambil informan lain di luar informan yang telah ditentukan oleh peneliti sebelumnya. Terdapat lima informan tambahan yaitu :

- a. Ketua Gerakan Kembali Bersekolah (GKB), Bapak Robikun, S.Ag.
- b. Ketua FMPP Kecamatan Jatibarang, Bapak Surono, M.Pd.
- c. Ketua FMPP Kecamatan Brebes, Bapak Rosikhin
- d. Guru SMP Pancasila Jatibarang
- e. Ririn selaku Siswa SMP Pancasila Jatibarang.

### **1.7.5. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yang menghasilkan uraian bersifat deskriptif berdasarkan hasil wawancara langsung terhadap subjek penelitian maupun pengamatan dan pemahaman terhadap objek penelitian. Terdapat dua jenis sumber data yaitu :

## 1. Data Primer

Data primer yaitu data yang bersumber dari informan atau data pertama pada lokasi penelitian maupun objek penelitian (Rahmadi, 2011). Dengan demikian, data primer dalam penelitian ini yaitu observasi dan wawancara langsung kepada subjek penelitian di lapangan.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data pendukung data primer, yang sifatnya tidak secara langsung diperoleh dari lapangan. Sumber dari data sekunder yaitu berupa jurnal, buku, maupun sumber kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan topik dan fokus pada penelitian ini.

### **1.7.6. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

#### 1. Wawancara

Wawancara yaitu suatu proses untuk memperoleh informasi, yang mana terjadi adanya interaksi antara pewawancara dengan informan melalui komunikasi secara langsung (Yusuf, 2014 dalam (Iryana & Kawasati, 2019). Tujuan dari wawancara adalah untuk memperoleh catatan opini, emosi, perasaan, maupun hal lain yang berkaitan dengan individu dalam suatu organisasi. Sehingga melalui teknik wawancara, peneliti dapat memperoleh lebih banyak informasi sekaligus memahami budaya, sifat, bahasa, ekspresi, bahkan

memperoleh klarifikasi terhadap hal – hal yang dirasa keliru dan tidak diketahui. Terdapat tiga bentuk wawancara (*interview*) yaitu :

- a. Wawancara terstruktur, yaitu peneliti sudah mempersiapkan dan sudah mengarahkan daftar pertanyaan sesuai dengan topik yang ada dalam penelitian secara ketat.
- b. Wawancara semi terstruktur, yaitu peneliti sudah mempersiapkan daftar pertanyaan, namun memungkinkan adanya pertanyaan yang muncul di luar daftar pertanyaan ketika sedang dalam topik pembicaraan.
- c. Wawancara tidak terstruktur, yaitu peneliti hanya terfokus pada topik permasalahan tanpa adanya ikatan format atau daftar pertanyaan tertentu.

(Harahap, 2020)

Pada penelitian ini, akan dilakukan wawancara dengan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga khususnya Bidang Pendidikan Dasar dan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Baperlitbangda) sebagai aktor yang berperan pengembangan, perencana, dan perumusan kebijakan untuk pelaksanaan program, serta Forum Masyarakat Peduli Lingkungan (FMPP) tingkat kabupaten sebagai pelaksana teknis Program Gerkan Kembali Bersekolah.

## 2. Dokumentasi

1. Memperpanjang waktu pengamatan, dengan melakukan hal tersebut peneliti dapat memungkinkan memperoleh peningkatan kepercayaan berdasarkan data yang diperoleh dan dikumpulkan. Sehingga peneliti dalam menarik kesimpulan penelitian lebih percaya diri.
2. Pengamatan dilakukan secara terus menerus, tujuannya untuk memperbanyak data dan meyakinkan peneliti bahwa tidak ada data yang tertinggal setelah memperoleh data.
3. Triangulasi, yaitu teknik mengecek data dan membandingkan antara data yang diperoleh dengan sumber lain atau membandingkan dua hasil penelitian di lain waktu atau di luar waktu penelitian.

(Harahap, 2020)

Terdapat tiga teknik dalam triangulasi yaitu:

1. Triangulasi sumber, yaitu teknik mengecek data yang diperoleh melalui berbagai sumber yang ada. Jika dari berbagai sumber telah diperoleh data, maka data tersebut dideskripsikan, diklasifikasikan terkait pandangan yang sama, berbeda, serta spesifikasi dari berbagai sumber data tersebut. Kemudian, data yang telah dianalisis dilakukan penarikan kesimpulan dan dilakukan kesepakatan (*member check*) terhadap sumber tersebut.
2. Triangulasi teknik, yaitu pengecekan data terhadap sumber yang sama, akan tetapi dengan teknik yang berbeda. Terdapat tiga teknik

untuk melakukan triangulasi yaitu wawancara, observasi, dan dokumen.

3. Triangulasi waktu, yaitu pengecekan data terhadap sumber namun dengan waktu yang berbeda.

Pada penelitian ini, akan menggunakan triangulasi data sebagai pengujian data atau validitas data. Triangulasi data yang digunakan yaitu triangulasi sumber, yang mana peneliti akan melakukan pengecekan sumber sekunder yang dapat diperoleh dari berita, jurnal, maupun dokumen lainnya terhadap sumber langsung yang menangani Program Gerakan Kembali Bersekolah. Setelah memperoleh hal tersebut, peneliti akan menganalisis dan menarik kesimpulan dari perolehan berbagai sumber langsung. Dengan demikian, teknik tersebut lebih mudah diterapkan dan diaplikasikan dalam penelitian ini.